

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh perorangan atau lebih yang masih belum *go public*. Usaha mikro kecil dan menengah telah terbukti memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan usaha mikro kecil menengah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan mampu membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Kontribusi pengusaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi negara memiliki persentase yang signifikan yaitu sebesar 99,9% dengan persentase penyerapan tenaga kerja sebesar 97%. Selain itu, dalam kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang memiliki peranan paling besar adalah UMKM dengan persentase sebesar 61,40% (Badan Pusat Statistik, 2017).

Besarnya peran UMKM dalam pembangunan maka diperlukan sebuah peningkatan agar dapat bersaing dengan perusahaan besar. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam pencapaian tujuan tersebut. Masyarakat berperan sebagai pelaku utama sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, memberikan perlindungan serta membimbing usaha. Selain itu, pihak luar yang berkepentingan seperti bank berperan dalam hal pemberian pinjaman karena pengembangan UMKM dapat dilakukan apabila memiliki modal usaha yang cukup.

Melakukan pinjaman di bank harus memiliki beberapa persyaratan. Dokumen yang terpenting sebagai persyaratan adalah laporan keuangan. Kegunaan laporan keuangan itu sendiri sebagai bahan pertimbangan oleh bank

dalam menilai kelayakan calon nasabah dalam menerima pinjaman. Selain sebagai syarat dokumen dalam peminjaman bank, laporan keuangan juga sebagai alat pengendali keuangan dalam pertumbuhan dan perkembangan usaha serta perwujudan bentuk tanggung jawab dalam mengelola usaha. Melalui laporan keuangan, kekayaan dan keuntungan usaha dapat diketahui sehingga pengusaha dapat mengawasi dengan mudah kemajuan usahanya. Namun, banyak Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum menyadari pentingnya pencatatan akuntansi.

Permasalahan laporan keuangan yang melekat didalam UMKM seakan tak bisa lepas dengan mudah. Hal ini dipicu dari adanya sumber daya manusia dengan pengetahuan dan keahlian yang minim mengenai pencatatan laporan keuangan. Untuk itu pemerintah terus melakukan upaya-upaya dalam meminimalisir permasalahan ini dengan mengadakan pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada pengusaha UMKM namun penggunaannya belum optimal dikarenakan model pembuatan pencatatan yang sulit dijangkau oleh sebagian UMKM (Mujiyono dkk, 2017). Sehingga dalam hal ini pencatatan akuntansi merupakan sebuah tantangan yang besar bagi pelaku UMKM.

Kesadaran bahwa UMKM memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian Indonesia, Dewan Standar Akutansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) yang merupakan penyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tahun 2009 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan. Namun, karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia apabila menggunakan SAK ETAP, pada tahun 2016 DSAK IAI mengesahkan SAK Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang merupakan pengembangan

dari standar akuntansi sebelumnya yaitu SAK ETAP dengan pengaturan akuntansi yang lebih sederhana.

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi kriteria sesuai dengan yang tertera di dalam SAK ETAP dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pengaturan yang termuat dalam SAK EMKM mengenai transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM dengan dasar pengukuran menggunakan biaya historis yang memudahkan EMKM karena hanya perlu mencatat asset dan liabilitasnya saja sebesar biaya perolehannya.

Alasan peneliti memilih topik ini adalah berdasarkan *Exposure Draft* SAK EMKM yang telah disahkan oleh DSAK IAI dalam rapatnya tanggal 24 Oktober 2016 akan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018. Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga dapat memperoleh akses untuk pembiayaan industri perbankan (Ikatan Akuntan Indonesia). Selain itu, dengan adanya SAK ini diharapkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah lebih termotivasi dalam menerapkan pencatatan akuntansi berupa laporan keuangan sesuai standar demi kemajuan usahanya.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kota industri di Jawa Timur dengan jumlah usaha sebesar 171.264 unit. Jumlah tersebut dibagi menjadi beberapa sektor diantaranya sektor pertanian sebesar 34.395 unit, sektor pertambangan dan penggalan sebesar 4 unit, sektor industri pengolahan sebesar 9.008 unit, sektor konstruksi sebesar 795 unit, sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 96.149 unit, sektor transportasi sebesar 5.096 unit, sektor keuangan sebesar 278 unit dan sektor jasa-jasa sebesar 25.539 unit. Selain itu,

jumlah diatas juga termasuk jumlah usaha mikro sebesar 154.891 unit, usaha kecil menengah sebesar 154 unit dan usaha besar sebesar 16.000 unit (Data DISKOPUKM JATIM).

Salah satu UMKM di Sidoarjo adalah UD Sumber Makmur. Usaha ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan mengolah limbah sampah plastik. Usaha ini sudah beroperasi selama kurang lebih sepuluh tahun. Usaha ini mengolah sampah plastik yang berupa kemasan makanan ringan untuk dilebur dan menjadi biji plastik. Biji plastik tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan alat rumah tangga seperti baskom, tempat sampah dan lain sebagainya yang bahan utamanya dari plastik. Alasan memilih UD Sumber Makmur karena berdasarkan Undang Undang No. 20 Tahun 2008 UD Sumber Makmur termasuk dalam kriteria Usaha Menengah karena setiap tahun penjualan rata-rata sebesar lebih dari Rp. 3.000.000.000 (Pembahasan Halaman 45).

Alasan memilih UD Sumber Makmur menjadi obyek penelitian karena dalam menjalankan usahanya, UD Sumber Makmur masih menggunakan pencatatan yang sederhana dan seadanya. Pernyataan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik yaitu Bapak Nur Salam sebagai berikut :

“nggak mbak karena saya buatnya sesuai kemampuan dan kebutuhan saya”

Hal ini disebabkan oleh keterbatasannya pengetahuan dan pemahaman pemilik dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu tidak tersediaanya tenaga ahli yang bertugas dalam penyusunan laporan keuangan menyebabkan pengusaha kesulitan dalam proses pencatatan dan penyusunan. Pernyataan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik yaitu Bapak Nur Salam sebagai berikut :

“kebutulan saya sendiri mbak, kadang juga dibantu dengan istri, lha mau bagaimana mbak belum nemu orang yang bisa bikin pembukuan seperti itu yang rapi dan tertata”

Pada dasarnya pencatatan keuangan telah dilakukan namun pencatatannya masih tidak terstruktur dan sistematis. Selain itu pemisahan harta antara harta pribadi dan usaha tidak dilakukan. Sehingga kas perusahaan akan digunakan untuk kebutuhan pribadi begitu juga sebaliknya. Hal ini menyebabkan pemilik tidak mengetahui bagaimana perkembangan usahanya karena yang terpenting masih ada sisa kas yang dapat digunakan untuk pembelian persediaan. Pernyataan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik yaitu Bapak Nur Salam sebagai berikut :

“ ... karena bagi Bapak yang penting ada uang yang cukup untuk membeli bahan baku karena kalau nggak gitu ya nggak produksi dong saya mbak, jadi ya gitu saya nggak tau apakah usaha saya maju atau nggak”

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan pencatatan laporan keuangan diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang akuntansi, terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni, kurangnya kesadaran pentingnya laporan keuangan serta sosialisasi, pelatihan dan pendampingan yang belum maksimal. Hal ini sesuai dengan penelitian Wiadnyana *et., al* (2017) dan Sholikin dan Setiawan (2018). Sehingga pencatatan dilakukan dengan sangat sederhana dan belum sesuai dengan standar keuangan yang berlaku umum.

Penelitian sebelumnya mengenai penerapan akuntansi pada UMKM yang masih menggunakan pencatatan sederhana dan SAK ETAP adalah penelitian Bugis (2017), Purwati (2017), Risnaningsih (2017) dan Wiadnyana *et., al* (2017). Ada juga penelitian yang sudah menggunakan SAK EMKM seperti Admaja (2018), Nurlaila (2018), Sholikin dan Setiawan (2018), Hetika dan Mahmudah (2018), dan

Rachmanti *et., al* (2019) namun dalam penelitian tersebut menggunakan tiga objek yang berbeda dan objek tersebut sudah melakukan pencatatan sesuai standar yang berlaku namun belum sesuai dengan SAK EMKM, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan satu objek saja serta pencatatan yang dilakukan masih sangat sederhana dan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Sesuai dengan diberlakukannya SAK EMKM bagi UMKM pada 1 Januari 2018. Peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai simulasi pencatatan akuntansi berdasarkan SAK EMKM yang memiliki tingkat kemudahan lebih tinggi dibandingkan dengan SAK ETAP, mengingat bahwa UMKM memiliki kendala mengenai pengetahuan sehingga dengan menggunakan SAK EMKM diharapkan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana simulasi pencatatan akuntansi pada pengusaha kecil menengah berdasarkan SAK EMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan simulasi pencatatan akuntansi berdasarkan SAK EMKM kepada pengusaha kecil menengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemilik usaha, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan dalam penggunaan ilmu akuntansi bagi pemilik usaha dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.

2. Bagi peneliti, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi peneliti dalam melakukan sosialisasi penerapan ilmu akuntansi mengenai penyusunan laporan keuangan sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak .
3. Bagi pembaca, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pembaca dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.